

**KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :
Liberata Malirmasele
002114146



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2004

SKRIPSI

**KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat**

Oleh:

Liberata Malirmasele

NIM : 002114146

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Firma Sulistiyowati, SE., MSi.

Tanggal 20 Juli 2004

Pembimbing II



MT. Ernawati, SE., MA

Tanggal 28 Juli 2004

SKRIPSI

**KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Liberata Malirmasele

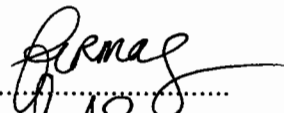
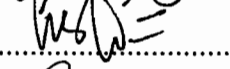
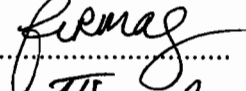

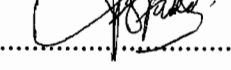
NIM : 002114146

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 24 Agustus 2004

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si	
Sekretaris	Lisia Apriani, SE., M.Si, Akt	
Anggota	Firma Sulistiyowati, SE., M.Si	
Anggota	MT. Ernawati, SE., MA	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt	


Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan




Kahu Lantum, M.S

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

We may not always realize
that everything we do
Affects not only our lives
but touches others, too

A single happy *SMILE*
can always brighten up the day
For anyone who happens
to be passing by your way

And a little bit of *THOUGHTFULNESS*
that shows someone you care
Creates a ray of *SUNSHINE*
for both of you to share

Yes, everytime you offer
someone a helping hand
Everytime
you show a *FRIEND*
you care and understand
Everytime
You have a kind and gentle
Word to give

You help someone find *BEAUTY*
in this precious life we live
For happiness bring happiness
and loving ways bring *LOVE*
And giving is the treasure that contentment is made of

AMANDA BRADLEY

Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi
daripada yang patut kamu pikirkan,
tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa,
sehingga kamu menguasai diri
menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah
kepada kamu masing-masing

(Roma 12:3)

Others will not care how much we know
Untill they know how much we care
I know God would not give me
Anything I could not handle,
I just wish that
He didn't trust me so much

(Mother Teresa)

This undergraduate thesis is dedicated to:

*My Savior "Jesus Christ"
My Holy Mother "Maria"
My beloved Father and Mother
("Joseph Malimasele" n "Johana Sunlety")
My lovely sisters and brother
("Erta", "Meis", "Delima", "Tommy")
All of my family*

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Penulis



Liberata Malirmasele

ABSTRAK

KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Studi Kasus Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

**Liberata Malirmasele
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2004**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui seberapa besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah; (2) mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat; (3) mengetahui penyebab naik turunnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan; (4) untuk mengetahui cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis horisontal, analisis kualitatif dan analisis SWOT. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah, analisis horisontal digunakan untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan, analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui penyebab naik turunnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pada tahun 2001 kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,86% , pada tahun 2002 turun menjadi 4,54% dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 1,65%; (2) Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan selalu mengalami kenaikan dalam realisasinya; (3) Meningkatnya PAD secara tidak langsung pada sektor kelautan dan perikanan disebabkan bertambahnya kelembagaan non formal, LSM dan alat penangkap ikan sedangkan menurunnya kontribusi PAD dari sektor kelautan dan perikanan disebabkan rendahnya SDM baik dari pihak nelayan maupun aparatur, tersebar dan terpercarnya usaha perikanan dan keadaan musim; (4) Berdasarkan analisis SWOT Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD dari sektor kelautan dan perikanan dengan mengubah cara pandang masyarakat, meningkatkan SDM di kalangan nelayan maupun aparatur, menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung.

ABSTRACT

THE CONTRIBUTION OF OCEANIC AND FISHERY SECTORS IN THE EFFORT TO INCREASE REGIONAL GENUINE INCOME A Case Study at The Oceanic and Fishery Service West South-East Maluku

**Liberata Malirmasele
Sanata Dharma University
Yogyakarta**

2004

This research aimed to: (1) discover the contribution of oceanic and fishery sectors to regional genuine income; (2) observe the development of regional genuine income from the oceanic and fishery sectors in west south-east Maluku regency; (3) to know the cause of increasing or decreasing regional genuine income from the oceanic and fishery sectors; (4) to find out the efforts that should be conducted so as to increase regional genuine income from oceanic and fishery sectors.

The data collection techniques used were interview and documentation. Data analysis techniques used were contribution, horizontal, qualitative and SWOT analysis. Contribution analysis was used to discover the contribution of the oceanic and fishery sectors to regional genuine income, horizontal analysis was used to calculate the development of regional genuine income generated from the oceanic and fishery sectors, qualitative analysis was used to know the cause of increasing or decreasing of regional genuine income from the oceanic and fishery sectors, while SWOT analysis was used to discover the efforts should be done to increase regional genuine income from the oceanic and fishery sectors.

Based on the data analysis the conclusions were as follows: (1) contribution of the oceanic and fishery sectors to regional genuine income in 2001 was 11,86%, in 2002 decreased to 4,54% and 1,65% in 2003; (2) regional genuine income from the oceanic and fishery sectors always increased in its realization; (3) the indirectly increasing in the oceanic and fishery sectors resulted from the increase number of non-formal institutions, NGOs and the fish catcher means while the decreasing of its contribution in regional genuine income was caused by low human resources of fisherman and also government officials, scattered fishing and inhabitant settlement and season circumstance; (4) based on SWOT analysis, Local Government of west South-East Maluku could conduct some efforts to increase regional genuine income from the oceanic and fishery sectors by altering the way of society approach, increasing human resources among fisherman and also government officials, creating the condusive effort climate and also provide other supporting medium.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan atas karunia-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Alex Kahu Lantum.,M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
2. Ir.Drs. Hansiadi YH.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma
3. Ibu Firma Sulistiyowati,SE.,MSi selaku pembimbing I yang penuh cinta dan kesabaran serta meluangkan waktunya membimbing penulis.
4. Bpk. Antonius Diksa Kuntara,SE selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan sabar membimbing penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama kuliah serta masukan bagi penulis.

6. Seluruh staf dan karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Pojok Bursa Efek Jakarta serta Perpustakaan-Mrican Universitas Sanata Dharma yang senantiasa membantu kelancaran skripsi ini.
7. Drs. A. Dahoklory selaku Kepala Kantor Dinas Pendapatan Maluku Tenggara Barat yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
8. Drs. I. Norimarna selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama staf yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penelitian.
9. Keluargaku yang telah membagikan cinta kasihnya, perhatian dan terkadang merepotkan buat Ayah, Mama, De'Erta, De' Meis, De' Ima, De' Tommy yang memberikan kehangatan sebuah keluarga dan dukungan doa.
I Love U !!!
10. Sahabat-sahabatku: Lina, Nova, dan Rini kalian adalah anugrah bagiku.
11. Teman-teman seperjuangan Akt C '00 Artha, Sr.Angela, Siti, Seto, Yuli Kartika, Yuli Gulo, Lusi, Ria Andriani, Sumastri, Dessy, Santi, Yuni, Asih, Heri, Anita *"Makasih udah jadi teman/sahabat selama aku kuliah"*
12. Teman-teman MPT Hartatik, Atiek, Thomas, Mba Venda, Mba Nelly, Kak Merry *"Makasih atas kebersamannya selama ini"*
13. Teman-teman KKP Ita, Ririn, Anton, Peter, Ela, Watik, Ota *" Makasih atas dukungannya"*
14. Kedua temanku yang selalu menyemarakkan hariku Lina 'n Widi *"Moga rukun selalu ya"*
15. Elie *"imoet"* Thx ya atas pinjaman komputernya, sorry kelamaan.....

16. Teman-teman Kampus Lidya, Flory, Nita, Menik, Santi, Yanti “ *Makasih atas doa dan bantuannya*”
17. Teman-teman Pringgo 8, buat Eli, Yani, Yessi, Yanti, Renata, Nano, Ririn, “*Makasih selama ini kalian udah jadi pendengar yang menyenangkan*”
18. Keluarga keduaku: Sr. Canisia SCMM, Sr. Agatha PBHK, Fr. Ignasius SVD, Fr. Benjamin CMM, Kalista, Gipit + K’ Marto, Lily, Any, Mba Yus, Yani, “*Thank U for the love, attention, fresh jokes and also beautiful times that we have been spent together*”
19. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Namun penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya. Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 31 Agustus 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keuangan Daerah.....	9
B. Pendapatan Daerah.....	12
C. Pendapatan Asli Daerah.....	13
D. Sektor Kelautan dan Perikanan.....	20
E. Analisis SWOT.....	22
F. Analisis Horisontal.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Teknik Analisis Data.....	25



BAB IV	GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH	
	A. Keadaan Geografi.....	28
	B. Keadaan Penduduk.....	29
	C. Pemerintahan.....	32
	D. Sosial.....	33
	E. Sumber Daya Alam.....	37
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	39
	B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan.....	42
	C. Penyebab Peningkatan dan Penurunan PAD pada Sektor Kelautan dan Perikanan.....	43
	D. Analisis SWOT.....	45
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Keterbatasan Penelitian.....	51
	C. Saran.....	51
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku sejak Januari 2001 menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab menuntut pergeseran peran pemerintah pusat sebagai posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ke arah peningkatan kemandirian daerah. Dalam rangka pengembangan kemandirian tersebut potensi daerah sangat penting untuk digali.

Daerah memiliki perencanaan keuangannya sendiri yang disebut APBD. Penyusunan anggaran selama ini oleh pihak eksekutif belum benar-benar mendasarkan diri pada sektor basis pertumbuhan daerah akibat kuatnya pengaruh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan tidak tergalinya potensi daerah baik dari sisi produksi maupun jenis-jenis pungutan. Membengkaknya pos pengeluaran rutin dan kurang terfokusnya pengeluaran untuk memacu tumbuh dan berkembangnya sektor basis merupakan ciri dari model pengeluaran di daerah.

Sektor basis adalah sektor yang mampu melayani pasar di dalam dan di luar daerah (Arsyad, 1999: 354). Berkembangnya pendapatan di sektor basis akan meningkatkan pendapatan regional secara langsung yang diikuti dengan kesempatan kerja.

Model pengeluaran pemerintah yang dapat terbaca dalam RAPBD merupakan arah pembangunan yang akan dilaksanakan daerah satu tahun ke depan. APBD seharusnya sebagai stimulan pembangunan bila disusun berdasarkan *leading sector*. Sebagai stimulan anggaran tersebut mampu menjadi motor penggerak untuk tumbuh dan berkembangnya sektor basis. Apabila sektor basis berkembang dengan baik, maka penerimaan daerah secara tidak langsung akan meningkat. Pengembangan potensi daerah dan penggalian sumber-sumber keuangan daerah dari sektor basis yang merupakan potensi daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan anggaran yang belum mengacu pada sektor basis suatu daerah diduga dapat menyebabkan lambatnya perkembangan perekonomian.

Pembangunan kelautan dan perikanan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Alasan ini didasari adanya perubahan paradigma pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan yang kurang "terperhatikan" menjadi "sektor utama" (*mainstream*) pembangunan nasional. Pertimbangan sektor ini sebagai *mainstream* pembangunan nasional diantaranya, karena luas wilayah laut yang dominan secara fisik, potensi ekonominya sangat besar dan

beragam, industri kelautan memiliki keterkaitan (*backward and forward-linkage industries*) yang tinggi dengan industri dan aktivitas ekonomi lainnya, sehingga mengembangkan industri berbasis kelautan berarti juga menghidupkan dan mendorong aktivitas ekonomi di sektor lainnya; sumber daya kelautan sebagian besar merupakan sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui (*renewable resources*) sehingga menjadi basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. (www.forek.or.id)

Maluku Tenggara Barat mendeklarasikan diri sebagai kabupaten bahari nusantara dimana kabupaten ini 88 persen wilayahnya berupa samudera. Selain dari luas wilayah laut yang dominan tersebut, potensi laut yang ada juga sangat besar dan beragam. Berangkat dari kondisi alam seperti itu, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor yang sangat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendeklarasian ini dijadikan titik tolak penyadaran dan pengembangan perekonomian masyarakat yang lebih difokuskan pada optimalisasi sumber daya laut. Masyarakat diajak melihat bahwa lautan luas di sekitar mereka, kalau dikelola dengan tepat akan meningkatkan perekonomian mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2003)?
2. Bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat?
3. Apa penyebab naik/turunnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan?
4. Bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui penyebab naik/turunnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan.
4. Untuk mengetahui cara meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan daerah.

2. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan bahan bacaan yang berguna bagi mahasiswa sehingga dapat menambah pengetahuan.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana untuk mempraktekkan teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta dapat mengembangkan wawasan .

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang adanya pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut daerah agar lebih mandiri dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam rangka pengembangan kemandirian tersebut potensi daerah sangat penting untuk digali. Selain itu juga dibahas tentang sektor kelautan dan perikanan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari latar belakang tersebut

diteruskan dengan merumuskan masalah tentang kontribusi sektor kelautan dan perikanan, perkembangan pendapatan sektor kelautan dan perikanan dan cara serta upaya meningkatkan penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan. Dan manfaat penelitian serta tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi uraian teoritis dari hasil studi pustaka. Uraian dalam bab ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai landasan berpikir bagi penulis dalam mengolah data yang diperoleh, dan menganalisa permasalahan untuk mendapatkan pemecahan atas permasalahan yang diajukan. Pembahasan berupa uraian tentang peranan sektor kelautan dan perikanan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga dibahas mengenai Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas mengenai penjelasan tentang jenis penelitian yang dilakukan yaitu berupa studi kasus, tempat penelitian yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara Barat dan uraian tentang waktu penelitian. Pembahasan selanjutnya tentang objek penelitian berupa data-

data Pendapatan Asli Daerah, kemudian teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi.

Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Daerah

Pada Bab IV yang dibahas adalah sejarah pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, batas-batas wilayahnya, luas wilayahnya dan sekilas tentang perkembangan daerah tersebut sampai dengan saat ini. Selain itu dibahas juga mengenai sektor-sektor yang menunjang maupun politik yang berlaku serta kebijakan politik yang diterapkan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Pada Bab V ini akan dibahas mengenai perhitungan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta melihat perkembangan pendapatan sektor kelautan dan perikanan. Analisis terakhir adalah analisis SWOT yang digunakan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan.

Bab VI Penutup

Bab VI ini berisi kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil penelitian dan penghitungan serta analisis yang telah dibuat. Kemudian dari kesimpulan yang ada dapat diberikan saran-

saran yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola keuangan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Salah satu masalah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah ketidakcukupan dana yang berasal dari daerah itu sendiri sehingga proses otonomi tidak bisa berjalan lancar, sebab keuangan daerah khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan daerah.

Pengertian keuangan daerah menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 adalah:

Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keuangan daerah menurut Mamesah dalam Abdul Halim (2002:19) adalah:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku.

2. Lingkup Keuangan Daerah

Lingkup keuangan daerah menurut Mamesah meliputi: (Abdul Halim,2002:20)

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

Pengalokasian penerimaan dalam keuangan daerah dimaksudkan dapat menggali sumber penerimaan seperti Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, subsidi dan bantuan pemerintah pusat, serta pinjaman daerah.

Kebijakan keuangan yang terus diupayakan kemantapannya secara garis besar mencakup komponen utama sebagai berikut (Ibnu Syamsi, 1983:188-189) :

- a. Kebijakan di dalam penerimaan daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendorong kemampuan daerah sebesar-besarnya di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri.
- b. Kebijakan di dalam pengeluaran berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta

pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek daerah serta pelaksanaannya.

- c. Kebijakan peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, termasuk kemampuan personil manajemen organisasi.
 - d. Kebijakan dalam sistem pemantauan dan pengendalian pembangunan daerah sehingga pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat dioptimalkan.
 - e. Kebijakan dalam membuka partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat di daerah dan penanaman modal secara komersial.
3. Asas-asas Keuangan Daerah

Asas-asas keuangan daerah menurut Mamesah dalam Abdul Halim (2002:21) yaitu:

a. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan menyangkut segi-segi pembiayaannya.

b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

B. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui usaha penggalian sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba bersih BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah bersumber dari dalam negeri dan dari luar negeri. Pinjaman Daerah dari dalam negeri bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Masyarakat

dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan daerah dan penerimaan pembangunan dan pengolahan kekayaan alam yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan (Devas, 1989:31).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah adalah:

Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari Dinas-Dinas, dan penerimaan lain-lain serta Penerimaan Pembangunan (Pinjaman Daerah).

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai urusan rumah tangga daerah. Semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi daerah sehingga akan memperkuat posisi keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang potensial berada di daerah terdiri dari:

a. Pajak daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Azhari (1995:41) adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

3. Pajak yang dipungut Daerah Tingkat II

a. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan
 5. Pajak Hiburan
 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 7. Pajak Parkir
- b. Tolak ukur untuk menilai pajak daerah

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada digunakan ukuran sebagai berikut (Devas, 1989:61-62):

1. Hasil (*Yield*)

Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan perbandingan hasil pajak dengan hasil pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang serta pajak bersangkutan harus adil secara horisontal artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber

daya ekonomi. Pungutan tersebut harus adil dalam arti tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi.

4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Soetrisno (1993:139) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu, yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Munawir (1990:4) adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan mendapat jasa balik secara langsung serta dapat ditunjuk.

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah, yaitu:

1. Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
2. Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
3. Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.

Penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan diperlukan oleh masyarakat. Dilihat dari objeknya, retribusi daerah masih dapat dikembangkan melalui peningkatan jasa pelayanan, sepanjang jasa pelayanan tersebut benar-benar nyata, tidak dibuat-buat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian retribusi tersebut tidak dapat dipungut terlalu tinggi dan tidak boleh merintang keluar masuknya barang kedalam atau keluar daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah merupakan pendapatan yang tidak kecil di dalam mengisi keuangan daerah, sedangkan bagi masyarakat merupakan suatu beban. Karena mempunyai arti penting bagi semua pihak maka berlakunya peraturan tentang retribusi daerah perlu

pengesahan dahulu oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan dalam peraturan daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah adalah sebagai berikut:

a. Retribusi dipungut oleh daerah

Dalam pungutan retribusi daerah terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.

b. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang diberikan atau disediakan pemerintah daerah.

c. Bagian Laba BUMD

Perusahaan daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk perkembangan ekonomi daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

Pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah atas dasar pertimbangan menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik masyarakat, untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami seperti angkutan umum atau telepon, dalam rangka mengambil alih perusahaan asing untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah dianggap cara yang efisien menyediakan layanan masyarakat dan/atau menebus biaya setara untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

(Devas,1989:111)

d. Penerimaan dari Dinas-Dinas

Penerimaan dari Dinas-Dinas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah adalah penerimaan dari Dinas-Dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

Dinas-dinas daerah bertugas dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan untung atau rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi dan pelayanan jasa.

e. Penerimaan lain-lain

Penerimaan lain-lain terdiri dari hasil penjualan milik daerah, misalnya penjualan barang-barang bekas, cicilan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa giro, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah dan lain-lain. Penerimaan daerah dari sektor ini memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan dari dinas-dinas.

D. Sektor Kelautan dan Perikanan

1. Strategi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan otonomi luas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan UU No 22 tahun 1999 maka prioritas pembangunan kelautan dan perikanan lima tahun kedepan (2002-2006) adalah:

- a. Peningkatan nelayan dari kemiskinan melalui pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan secara optimal untuk menumbuhkan pusat produksi perikanan secara lokal dan regional yang dapat dikembangkan menjadi pusat perekonomian pedesaan.
- b. Peningkatan produktifitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian perikanan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
- c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat nelayan terutama untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi investor.
- d. Peningkatan jumlah dan kemampuan aparatur birokrasi perikanan di semua tingkatan pelaksanaan tugas serta peningkatan sumber daya nelayan dalam rangka membentuk kemandirian dan profesionalisme.
- e. Pengembangan pulau kecil secara sistematis dan terpadu dengan kelembagaan terkait lainnya untuk diberdayakan bagi kepentingan daerah dan masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan 2002-2006 dalam rangka mewujudkan otonomi daerah maka ada sejumlah program yang perlu dikembangkan:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan aparatur kedinasan perikanan dan nelayan sebagai obyek dan sekaligus subyek pembangunan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik sumber daya perikanan dan karakteristik usaha perikanan yang ditekuni oleh nelayan.

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Program ini dilaksanakan untuk mengelola sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya dengan tetap mengacu pada strategi pengembangan kawasan dan karakteristik perikanan di setiap kawasan.

c. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

d. Program Pengembangan Pesisir dan Pulau Kecil

e. Program Pengembangan Perekonomian Daerah.

2. Objek dan Subjek Pungutan Perikanan

a. Objek Pungutan Perikanan untuk:

1. Pungutan Perusahaan Perikanan adalah seluruh modal investasi yang ditanam oleh Perorangan atau Badan Hukum Indonesia yang memperoleh IUP dan SPI.

2. Pungutan Hasil Perikanan adalah produksi usaha perikanan yang akan dijual dalam negeri atau diekspor, dihitung berdasarkan standar data perhitungan pada waktu / saat proses penerbitan IUP dan atau pada saat penerbitan dan perpanjangan SPI.
 - b. Subjek Pungutan PPP dan PHP adalah orang atau badan hukum yang memohon dan memperoleh IUP dan atau SPI.
3. Tarif Pungutan Perikanan
 - a. PPP dipungut sebesar 0,5% dari modal investasi seluruh kegiatan usaha yang telah disetujui untuk mendapat IUP.
 - b. PHP dipungut sebesar 2,5% dari transaksi harga jual seluruh produk usaha perikanan.

E. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah: (Mardiasmo,2002:51)

Strategi organisasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan organisasi yakni dengan cara menganalisis faktor internal organisasi yang menjadi kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi dan memperhitungkan faktor eksternal berupa ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*).

Pengertian SWOT adalah: (Supriono,1998:72) analisis faktor intern dan ekstern yang meliputi faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan, faktor kesempatan dan ancaman perusahaan.

Masing-masing faktor ini adalah:

1. Strength

Adalah kekuatan-kekuatan atau keunggulan dari organisasi yang memberikan keuntungan dalam mencapai sasaran.

2. *Weaknesses*

Adalah faktor yang membatasi atau menghambat organisasi dalam mencapai sasaran.

3. *Opportunities*

Adalah keadaan ekstern organisasi yang memberi kesempatan berkembangnya atau berhasilnya organisasi dalam mencapai sasaran.

4. *Threats*

Adalah faktor eksternal yang mengancam atau menghambat organisasi dalam mencapai sasaran.

F. Analisis Horisontal

Analisis horisontal merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan perubahan variabel dari suatu periode ke periode lain, dimana perbandingannya didasarkan pada periode sebelumnya. Dengan menggunakan analisis horisontal, perubahan dapat dinyatakan dalam satuan moneter maupun dalam persentase.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data di lokasi yang akan diteliti dan didukung dengan penelitian kepustakaan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2004

C. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian yaitu :

Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara Barat

2. Objek Penelitian yaitu :

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berasal dari Penerimaan Dinas Kelautan dan Perikanan

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penelitian.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PAD.

E. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan analisis kontribusi (angka pembanding).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

$$C_n = \frac{RX_n}{R_{yn}} \times 100\% \quad (\text{Wua, 2002:75})$$

Dimana :

C_n : Kontribusi atau sumbangan sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah

RX : PAD dari sektor kelautan dan perikanan



Ry : Pendapatan Asli Daerah

n : Tahun tertentu

Tabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Format Tabel Analisis Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan
terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Sektor Kelautan dan Perikanan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
(a)	(b)	(c)	(b/c)
2001			
2002			
2003			

2. Untuk menjawab permasalahan kedua yaitu mengenai perkembangan PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2003, penulis menggunakan analisis horisontal dengan formula:

a. Perubahan dalam rupiah = $Y_t - (Y_{(t-1)})$

b. Perubahan dalam persentase (%) = $\frac{Y_t - (Y_{(t-1)})}{Y_{(t-1)}} \times 100\%$

Dimana:

Y_t = penerimaan PAD dari sektor kelautan dan perikanan masing-masing variabel yang dicari.

Y_{t-1} = penerimaan PAD dari sektor kelautan dan perikanan pada masing-masing variabel satu tahun sebelum tahun yang dihitung.

Tabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Format Tabel Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Anggaran (Rp)	%		Realisasi (Rp)	%
2001						
2002						
2003						

3. Untuk mengetahui penyebab naik/turunnya pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan maka digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait serta menggunakan studi pustaka dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada.
4. Untuk mengetahui upaya atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sektor kelautan dan perikanan maka penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu analisis SWOT.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

A. Keadaan Geografi

Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan kabupaten yang termasuk dalam wilayah provinsi Maluku dimana Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2000. Kabupaten Maluku Tenggara Barat terletak diantara 6⁰ sampai 8⁰ Lintang Selatan dan 126⁰ sampai 132⁰ Bujur Timur. Secara geografis, letaknya berbatasan antara lain dengan Laut Timor dan Samudra Pasifik di sebelah selatan, Laut Banda di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah timur dan Laut Flores di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kira-kira 14.584 km². Luas lautannya kira-kira 7,6 kali luas daratan.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Darat	Laut	Luas Wilayah (km ²)
1. Pp Terselatan ^a	2.307	17.533,2	19.840,2
2. Damer			
3. Wetar			
4. Lemola ^b	3.629	27.580,4	31.209,4
5. Mola			
6. Pp. Babar ^c	2.456	18.665,6	21.121,6
7. Mdon Heira			
8. Babar Timur			
9. Tanimbar Selatan ^d	1.506	11.445,6	12.951,6
10. Wer – Maktian			
11. Wer – Tamrian			
12. Selaru			

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Menurut Kecamatan (lanjutan)

Kecamatan		Darat	Laut	Luas Wilayah (km ²)
13.	Tanimbar Utara ^e	4.686	35.613,6	40.229,6
14.	Kormomolin			
15.	Nirunmas			
16.	Wuar – Labobar			
17.	Yaru			
Total		14.584	110.838,4	125.422,4

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Keterangan : a) Termasuk Damer, Wetar

b) Termasuk Mola

c) Termasuk Mdon Hiera, Babar Timur

d) Termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian, Selaru

e) Termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar, Yaru

Kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari sejumlah pulau besar dan kecil yang seluruhnya berjumlah 133 pulau. Daerah kepulauan ini terdiri dari 88 pulau yang didiami sedangkan sisanya 54 pulau tidak didiami.

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam perkembangan suatu daerah atau wilayah, karena faktor ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi terjadinya aktivitas di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional jika penduduk tersebut mempunyai kualitas yang baik.

Pertumbuhan yang pesat akan berakibat pada sulitnya peningkatan kesejahteraan yang layak dan merata sehingga akan

berakibat pada mutu kehidupan itu sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang besar dengan kualitas yang tinggi tidaklah mudah untuk dicapai.

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tahun 2002 berjumlah 153.534 jiwa dengan luas wilayah. Dengan demikian tingkat kepadatan penduduk 11 jiwa/km².

2. Komposisi Penduduk

a. Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau antar kecamatan maka sebagian besar kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat mempunyai jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya, tabel di bawah ini menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 4.2
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio
1	Pp Terselatan	7.341	7.309	100
2	Damer	2.500	2.605	96
3	Wetar	3.361	3.214	105
4	Lemola	3.671	3.855	95
5	Mola	4.804	5.106	94
6	Pp. Babar	4.093	4.361	94
7	Mdona Heira	2.387	2.475	96
8	Babar Timur	4.383	4.584	96
9	Tanimbar Selatan	9.731	10.033	97
10	Wer – Maktian	4.493	4.720	95
11	Wer – Tamrian	4.585	4.539	10

Tabel 4.2
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menurut Kecamatan (lanjutan)

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio
12	Selaru	5.481	5.514	99
13	Kormomolin	2.817	2.868	98
14	Nirunmas	3.731	3.719	100
15	Wuar – Labobar	4.017	3.533	114
16	Tanimbar Utara	6.414	6.585	97
17	Yaru	2.241	2.464	9
	Kab. MTB	76.050	77.484	98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Maluku Tenggara Barat

b. Menurut Mata Pencapaian

Struktur penduduk menurut mata pencapaian menunjukkan keadaan ekonomi dari wilayah tersebut. Data menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama yang diusahakan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.

Tabel 4.3
Struktur Penduduk Menurut Mata Pencapaian Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah Penduduk	%
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	48.963	73,43
2.	Pertambangan & Penggalian	354	0,53
3.	Industri	465	0,697
4.	Listrik, Gas & Air Minum	111	0,17
5.	Bangunan	576	0,86
6.	Perdagangan	5.754	8,63
7.	Angkutan dan Komunikasi	1.107	1,66
8.	Keuangan	399	0,59
9.	Jasa Kemasyarakatan	8.952	13,42
	Jumlah	66.681	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Maluku Tenggara Barat

c. Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada umumnya masih rendah. Sebagian besar penduduk berumur 10 tahun ke atas mempunyai tingkat pendidikan SD ke bawah. Sedangkan penduduk yang tamat Diploma/ Akademi/ Universitas sebesar 1.61%.

Tabel 4.4
Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Jumlah Penduduk (jiwa)	%
1.	Tidak/belum pernah sekolah	10.356	6.19
2.	Belum Tamat SD	53.887	32.22
3.	SD	75.948	45.42
4.	SLTP/Sederajat	11.075	6.62
5.	SMU/Sederajat	7.683	4.60
6.	SMK	5.581	3.34
7.	Diploma I/Diploma II	610	0.36
8.	Akademi/Diploma III	1.049	0.63
9.	Universitas	1.034	0.62
	Jumlah	167.223	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Maluku Tenggara Barat

C. Pemerintahan

Pada tahun 1957 sampai dengan tahun 1999 Maluku Tenggara Barat masih merupakan kecamatan di bawah kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Kabupaten Maluku Tenggara akhirnya dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Barat.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara Barat membawahi 5 kecamatan yaitu: Kecamatan P.P. Terselatan, Leti Moa Lakor, P.P. Babar, Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara. Namun pada tahun 2002 kelima kecamatan itu dimekarkan lagi menjadi 17 kecamatan yaitu: Kecamatan P.P. Terselatan, Damer, Wetar, Leti Moa Lakor, Moa Lakor, P.P. Babar, Mdon Heira, Babar Timur, Tanimbar Selatan, Wer-Maktian, Wer-Tamrian, Selaru, Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar, Tanimbar Utara dan Yaru.

D. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan bagi setiap warga negara merupakan usaha untuk menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menggerakkan roda pembangunan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai pelaku pembangunan. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peran pendidikan membuat bidang pendidikan menjadi perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Secara umum perkembangan pendidikan di Maluku Tenggara Barat mengalami kemajuan. Tahun 2002 banyaknya sekolah, guru dan murid di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak : terdapat 25 Sekolah dengan jumlah murid sebanyak 516 orang dan jumlah guru sebanyak 42 orang.

2. Sekolah Dasar : terdapat 269 Sekolah dengan jumlah murid sebanyak 27.756 orang dan jumlah guru sebanyak 1.817 orang.
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama : terdapat 70 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 9.520 orang dan jumlah guru sebanyak 810 orang.
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas : terdapat 15 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 3.428 orang serta jumlah guru sebanyak 291 orang.

Untuk lebih jelasnya, persebaran lokasi sarana pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Persebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan			
		TK	SD	SLTP	SLTA
1	Pp. Terselatan ^a	8	51	10	1
2	Damer				
3	Wetar				
4	Lemola ^b	3	33	7	1
5	Mola				
6	Pp. Babar ^c	2	59	13	3
7	Mdona Heira				
8	Babar Timur				
9	Tanimbar Selatan ^d	7	61	19	6
10	Wer-Maktian				
11	Wer-Tamrian				
12	Selaru				
13	Tanimbar Utara ^c	5	65	21	4
14	Nirunmas				

Tabel 4.5
Persebaran Lokasi Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (lanjutan)

No	Kecamatan	Sarana Pendidikan			
		TK	SD	SLTP	SLTA
15	Wuar Labobar				
16	Kormomolin				
17	Yaru				
	Total	25	269	70	15

Sumber : Maluku Tenggara Barat Dalam Angka 2003

Keterangan : a) Termasuk Damer, Wetar

b) Termasuk Mola

c) Termasuk Mdon Hiera, Babar Timur

d) Termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian, Selaru

e) Termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar, Yaru

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah dan memadai. Dengan tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya semua warga masyarakat memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki 1 buah rumah sakit yang berlokasi di kota Saumlaki. Sedangkan lokasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu tersebar pada setiap ibukota kecamatan. Persebaran lokasi sarana kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6
Persebaran Lokasi Sarana Kesehatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Posyandu	Rumah Bersalin
1	Pp. Terselatan		1	7	39 ^a	
2	Damer		0	2		
3	Wetar		2	6		
4	Lemola		1	5	23 ^b	
5	Mola		1	5		
6	Pp. Babar		1	5	54 ^c	
7	Mdona Heira		1	3		
8	Babar Timur		2	7		
9	Tanimbar Selatan	1	1	4	53 ^d	
10	Wer-Maktian		1	3		
11	Wer-Tamrian		0	4		
12	Selaru		2	4		
13	Tanimbar Utara		1	3	52 ^e	
14	Nirunmas		1	4		
15	Wuar Labobar		1	6		
16	Kormomolin		0	3		1
17	Yaru		1	1		
	Kab MTB	1	17	72	221	1

Sumber : Maluku Tenggara Barat Dalam Angka 2003

Keterangan : a) Termasuk Damer, Wetar

b) Termasuk Mola

c) Termasuk Mdona Hiera, Babar Timur

d) Termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian, Selaru

e) Termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar, Yaru

3. Fasilitas Peribadatan

Sarana peribadatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah Gereja Katolik 38 buah, Gereja Protestan 185 buah dan

Masjid 4 buah. Untuk lebih jelasnya persebaran lokasi fasilitas peribadatan dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Persebaran Lokasi Sarana Peribadatan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat

No	Kecamatan	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Masjid
1	Pp Terselatan ^a	1	38	
2	Damer			
3	Wetar			
4	Lemola ^b	1	28	
5	Mola			
6	Pp. Babar ^c	1	50	
7	Mdon Heira			
8	Babar Timur			
9	Tanimbar Selatan ^d	20	33	1
10	Wer- Maktian			
11	Wer- Tamrian			
12	Selaru			
13	Tanimbar Utara ^e	15	36	3
14	Kormomolin			
15	Nirunmas			
16	Wuar-Labobar			
17	Yaru			
	Kabupaten MTB	38	185	4

Sumber : Maluku Tenggara Barat Dalam Angka 2003

Keterangan : a) Termasuk Damer, Wetar

b) Termasuk Mola

c) Termasuk Mdon Hiera, Babar Timur

d) Termasuk Wer-Maktian, Wer-Tamrian, Selaru

e) Termasuk Kormomolin, Nirunmas, Wuar-Labobar, Yaru

E. Sumber Daya Alam

Kabupaten Maluku Tenggara Barat sangat kaya akan hasil laut dan juga hasil pertanian sehingga sebagian besar masyarakat Maluku Tenggara Barat adalah nelayan dan petani. Pada sub sektor pertanian tanaman pangan yang terbesar adalah ketela pohon, umbi-umbian, dan juga buah-

buahan. Sub sektor perkebunan meliputi: kelapa, kemiri, kopi, cengkeh, coklat, pala, kapas dan jambu mete. Sub sektor peternakan meliputi: ayam, kambing, babi, sapi, kerbau.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi yang sangat besar, secara geografis posisi Kabupaten Maluku Tenggara Barat berada di tepian Laut Banda dan tepian barat Laut Arafura. Dengan demikian maka nelayan di Maluku Tenggara Barat dapat memanfaatkan ketersediaan potensi sumber daya perikanan di Laut Banda sebesar 248.370 ton / tahun dan Laut Arafura sebesar 792.230 ton / tahun.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 5.1
Jumlah PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pendapatan Asli Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan
2001	309.613.300	36.727.500
2002	897.166.355	40.735.950
2003	3.522.338.171	58.178.200

Sumber data: Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Maluku Tenggara Barat

Untuk mengetahui sumbangan/kontribusi sektor kelautan dan perikanan tiap tahun digunakan rumus:

$$C_n = \frac{RX_n}{R_{yn}} \times 100\%$$

Dimana :

C_n : Kontribusi atau sumbangan sektor kelautan dan perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah

RX : PAD dari sektor kelautan dan perikanan

Ry : Pendapatan Asli Daerah

n : Tahun tertentu

Jumlah kontribusi untuk sektor kelautan dan perikanan adalah:

a. Tahun 2001

$$\begin{aligned}
 C_n &= \frac{RX_n}{R_{yn}} \times 100\% \\
 &= \frac{36.727.500}{309.613.300} \times 100\% \\
 &= 11,86\%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan untuk tahun anggaran 2001 sebesar 11,86%

b. Tahun 2002

$$\begin{aligned}
 C_n &= \frac{RX_n}{R_{yn}} \times 100\% \\
 &= \frac{40.735.950}{897.166.355} \times 100\% \\
 &= 4,54\%
 \end{aligned}$$

Besarnya kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan untuk tahun anggaran 2002 sebesar 4,54%

c. Tahun 2003

$$C_n = \frac{RX_n}{R_{yn}} \times 100\%$$

$$= \frac{58.178.200}{3.522.338.171} \times 100\%$$

$$= 1,65\%$$

Besarnya kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan untuk tahun anggaran 2003 sebesar 1,65%

Tabel 5.2

Hasil dari Perhitungan Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tahun Anggaran (a)	PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan (b)	Pendapatan Asli Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)
2001	36.727.500	309.613.300	11,86
2002	40.735.950	897.166.355	4,54
2003	58.178.200	3.522.338.171	1,65

B. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2001 sampai dengan tahun 2003.

Perkembangan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah di sektor kelautan dan perikanan tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel 5.3

Tabel 5.3
Perkembangan PAD pada sektor Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2001 sampai Tahun Anggaran 2003

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan		Realisasi (Rp)	Pertumbuhan	
		Anggaran (Rp)	%		Realisasi (Rp)	%
2001	34.275.000			36.727.500		
2002	38.500.000	4.225.000	12,33	40.735.950	4.008.450	10,9
2003	50.000.000	11.500.000	29,87	58.178.200	17.442.250	42,82

Sumber : DISPENDA Kab. Maluku Tenggara Barat, diolah penulis.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan PAD di sektor Kelautan dan Perikanan dari tahun ke tahun mengalami perubahan dalam anggaran dan realisasi. Pada tahun anggaran 2002 PAD sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan dalam realisasi sebesar 10,9% dan pada tahun 2003 naik lagi menjadi 42,82%.

$$\frac{38.500.000 - 34.275.000}{34.275.000} \times 100$$

C. Penyebab Peningkatan dan Penurunan PAD pada sektor Kelautan dan Perikanan

1. Penyebab Secara Tidak Langsung Peningkatan PAD pada Sektor Kelautan dan Perikanan
 - a. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Meskipun keberadaannya masih terbatas, namun peranannya dalam pembangunan cukup besar dan mempunyai kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait. LSM ini berperan dalam peningkatan sumber daya nelayan dengan mengadakan pelatihan manajemen usaha.
 - b. Adanya kelembagaan non formal yang eksistensinya diakui oleh pemerintah yaitu kelompok nelayan. Kelompok nelayan ini berjumlah 717 kelompok sedangkan jumlah anggotanya adalah 11.087 nelayan. Adanya kelompok nelayan ini dapat mempermudah jangkauan pembinaan yang dilakukan oleh instansi maupun LSM yang terkait.
 - c. Meningkatnya jumlah alat penangkap ikan maupun jumlah perahu/kapal penangkap ikan. Jumlah alat penangkapan ikan pada tahun 2002 sebesar 13.847 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 15.267 unit dengan perincian : jaring insang hanyut pada tahun 2002 sebesar 1.427 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 1.853 unit, jaring angkat/bagan pada tahun 2002 sebesar 172 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 264 unit, pancing tangan/tonda pada tahun 2002 sebesar 4.195 unit dan pada tahun 2003 meningkat

pada tahun 2003 meningkat menjadi 3044 unit, lain-lain pada tahun 2002 sebesar 5.358 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 5.690 unit. Sedangkan jumlah kapal/perahu penangkap ikan pada tahun 2002 sebesar 11.562 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 14.702 unit dengan perincian: perahu tanpa motor / jukung pada tahun 2002 sebesar 10.701 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 13.298 unit, motor tempel / ketinting pada tahun 2002 sebesar 782 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 1.311 unit dan kapal motor pada tahun 2002 sebesar 79 unit dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 93 unit.

2. Penyebab Penurunan PAD pada Sektor Kelautan dan Perikanan
 - a. Rendahnya pendidikan dari nelayan sehingga kemampuan mereka dalam penguasaan teknologi perikanan masih sangat terbatas. Alat-alat yang digunakan masih bersifat tradisional.
 - b. Masih terbatasnya aparatur perikanan baik dalam jumlah maupun mutu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal.
 - c. Tersebar dan terpecahnya usaha perikanan, demikian juga pemukiman penduduk yang berakibat menyulitkan pembinaan dan kegiatan-kegiatan penyuluhan perikanan.
 - d. Keadaan musim yang berombak disertai angin yang kencang menyebabkan nelayan tidak dapat berproduksi dengan baik.

D. ANALISIS SWOT

Analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threat*), digunakan untuk mengetahui upaya atau tindakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut. Adapun beberapa faktor/unsur yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan antara lain:

1. *Strength* (kekuatan)

- a). Keberadaan perairan Maluku Tenggara Barat terutama perairan Selatan Daya sebagai media lintas raya komoditas perikanan tuna.
- b). Keberadaan Maluku Tenggara Barat pada pinggiran kawasan laut pulau dan “Laut Banda” serta Laut Timor, Laut Flores, Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik yang masing-masing memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar.
- c). Adanya potensi komoditas budidaya serta lahan budidaya yang luas pada hampir semua perairan pesisir.
- d). Komitmen Pemerintah Daerah membangun dari laut ke darat dengan mendeklarasikan Maluku Tenggara Barat sebagai Kabupaten Kepulauan Bahari Nasional oleh seluruh komponen masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

2. *Weakness* (kelemahan)

- a). Terbatasnya aparatur perikanan baik dalam jumlah maupun mutu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal.

- b). Rendahnya pendidikan nelayan sehingga kemampuan mereka dalam penguasaan teknologi perikanan masih sangat terbatas. Alat-alat yang digunakan masih bersifat tradisional.
 - c). Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, dimana peralatan yang digunakan masih bersifat tradisional sehingga tidak memberikan hasil yang optimal.
 - d). Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan masih bersifat sambaran. Masyarakat Maluku Tenggara Barat belum menggantungkan seluruh kehidupannya pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - e). Pelaksanaan operasi para nelayan sangat bergantung pada musim. Pada umumnya mereka beroperasi saat musim timur berlangsung yaitu dari bulan April sampai Oktober karena pada saat itu keadaan musim relatif teratur. Puncak musim penangkapan ikan berlangsung bulan September sampai November karena pada saat itu kondisi laut relatif tenang/tidak berombak dan air surut mencapai titik terendah.
 - e). Terbatasnya modal usaha di tingkat perikanan rakyat disertai penguasaan teknologi perikanan yang masih sangat terbatas.
3. *Opportunity* (peluang)
- a). Permintaan pasar komoditas perikanan yang terus meningkat.
 - b). Penurunan potensi dan produksi perikanan di daerah lain.
4. *Threat* (ancaman)
- a). Penangkapan ikan secara ilegal dan destruktif.

- b). Intervensi kapal perikanan industri ke dalam wilayah perikanan rakyat.
- c). Lemahnya penegakan hukum di laut oleh aparat terkait.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PAD dari Sektor Kelautan dan Perikanan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan terbatasnya aparatur perikanan baik dalam jumlah maupun mutu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal, maka perlu ditingkatkan jumlah dan kemampuan aparatur birokrasi perikanan di segala tingkatan pelaksanaan tugas.
2. Dengan memperhatikan rendahnya pendidikan nelayan yang menyebabkan terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi perikanan, maka pengetahuan dan ketrampilan nelayan dalam mengelola potensi sumber daya perikanan perlu ditingkatkan.
3. Dengan memperhatikan potensi sumber daya perikanan yang besar serta persepsi masyarakat terhadap sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi sampingan, maka perlu mengubah cara pandang masyarakat dengan menjadikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi andalan.
4. Dengan memperhatikan terbatasnya modal usaha di tingkat perikanan rakyat, maka perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor untuk mengelola potensi sumber daya kelautan dan pengembangan kemitraan usaha.

5. Dengan memperhatikan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, maka perlu dikembangkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana dan prasarana usaha disertai pengembangan kelembagaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2001 sebesar 11,86%, pada tahun 2002 turun menjadi 4,54% dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 1,65%. Jika dibandingkan dengan potensi kelautan dan perikanan yang ada maka kontribusi yang diberikan oleh Sektor Kelautan dan Perikanan masih sangat kecil.
2. Perkembangan PAD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 selalu mengalami kenaikan pada anggaran dan realisasinya. Tingkat pertumbuhan PAD pada sektor kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2003 yaitu 42,82%. Sedangkan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2002 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,9%.
3. PAD dari sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2001 sampai 2003 pada umumnya mengalami peningkatan dalam realisasinya. Meskipun demikian kontribusinya dari tahun 2001 sampai 2003 cenderung menurun. Meningkatnya PAD secara tidak langsung pada sektor kelautan dan perikanan ini disebabkan karena:

- a. Adanya LSM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang memberikan pelatihan manajemen usaha terhadap para nelayan.
- b. Bertambahnya kelembagaan non formal yang eksistensinya diakui oleh pemerintah dan masyarakat.
- c. Bertambahnya jumlah alat penangkap ikan maupun jumlah kapal/perahu penangkap ikan.

Sedangkan menurunnya PAD dari sektor kelautan dan perikanan disebabkan karena:

- a. Rendahnya pendidikan dari nelayan sehingga kemampuan mereka dalam penguasaan teknologi perikanan masih sangat terbatas. Alat-alat yang digunakan masih bersifat tradisional.
 - b. Masih terbatasnya aparatur perikanan baik dalam jumlah maupun mutu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak optimal.
 - c. Tersebar dan terpecahnya usaha perikanan, demikian juga pemukiman penduduk yang berakibat menyulitkan pembinaan dan kegiatan-kegiatan penyuluhan perikanan.
 - d. Keadaan musim yang berombak disertai angin yang kencang menyebabkan nelayan tidak dapat berproduksi dengan baik.
4. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Kelautan dan Perikanan, maka berdasarkan analisis SWOT diusulkan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan jumlah dan kemampuan aparatur birokrasi perikanan.
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan.



- c. Mengubah cara pandang masyarakat dari menjadikan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai sumber ekonomi sampingan, menjadi sumber ekonomi andalan.
- d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investor untuk mengelola potensi sumber daya kelautan dan pengembangan kemitraan usaha.
- e. Mengembangkan kemandirian nelayan melalui dukungan sarana dan prasarana usaha disertai pengembangan kelembagaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian hanya dapat dilakukan terhadap tiga tahun anggaran karena Kabupaten Maluku Tenggara Barat baru berdiri pada akhir tahun 2000 sehingga analisis hanya didasarkan pada tiga tahun anggaran tersebut.

C. Saran

1. Mengingat sumber daya kelautan dan perikanan yang begitu besar maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan sangat dibutuhkan. Untuk itu peningkatan sumber daya manusia pesisir harus dijadikan salah satu prioritas.
2. Karena budidaya laut dan perikanan berbasis budidaya merupakan masa depan masyarakat pesisir Maluku Tenggara Barat maka kajian-kajian terhadap ketersediaan lahan dan spesifikasi komoditas budidaya sudah harus dilakukan, disertai intensifikasi sosialisasi budidaya laut kepada masyarakat yang tidak berkultur budidaya dapat dipersiapkan lebih dini.

3. Dalam memprediksi pendapatan daerah untuk tahun-tahun ke depan, pemerintah daerah jangan hanya berdasarkan pada evaluasi tahun yang lalu tetapi juga didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony-Dearden-Bedford. (1993). *Sistem Pengendalian Intern 1*. Jakarta: Bina Aksara
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Devas, Nick . (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo (2002) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro. (2001). Titik Berat Otonomi pada DATI II dalam *Otonomi Peluang dan Tantangan*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Munawir. (1990). *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty
- Rokhmin Dahuri (2003). Jadikan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional. www.forek.or.id dalam Suara Pembaruan 9 Agustus 2003
- Soetrisno, P.H. (1993) *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta; BPFE-UGM
- Supriono, R.A. (1998). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE-UGM
- Syamsi, Ibnu. (1983). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bandung: Kuraiko Pratama.
- Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wua, Veronika Stefania (2002). *Peranan PBB dalam meningkatkan Penerimaan Daerah*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi USD Yogyakarta.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Bukit Duri Telp. (0918) 21431. Fax. (0918) 21431
 SAUMLAKI

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2001		KET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	PAJAK DAERAH :	101.700.000	103.995.000	
1	Pajak Hotel	6.500.000	4.700.000	
2	Pajak Restoran	7.000.000	9.000.000	
3	Pajak Hiburan	22.500.000	25.270.000	
4	Pajak Reklame	23.500.000	20.025.000	
5	Pajak Penerangan Jalan	27.200.000	28.000.000	
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c	15.000.000	17.000.000	
II	RETRIBUSI DAERAH	151.645.000	194.083.300	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.000.000	20.000.000	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	5.000.000	8.800.000	
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	10.000.000	15.085.000	
4	Retribusi Pasar	16.200.000	18.100.000	
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.000.000	10.000.000	
6	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	19.000.000	20.700.000	
7	Retribusi Terminal	22.000.000	25.150.000	
8	Retribusi Izin Membangun Bangunan	3.500.000	5.000.000	
9	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	6.670.000	7.175.000	
10	Retribusi Izin Gangguan	--	5.000.000	

1	2	3	4	5
11	Retribusi Izin Trayek	6.500.000	8.575.000	
12	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	2.000.000	5.000.000	
13	Retribusi Izin Pengeluaran Barang dari Daerah	--	--	
14	Retribusi Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi	--	--	
15	Retribusi Izin Kepariwisataaan	2.500.000	3.470.000	
16	Pungutan Daerah Usaha Perikanan	34.275.000	36.727.500	
17	Retribusi Izin Pungutan Hasil hutan	--	--	
18	Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan	--	5.300.000	
III	LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	--	--	
1	P.T. Bank Maluku	--	--	
2	Perusahaan Daerah Air Minum	--	--	
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	--	11.535.000	
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	--	--	
2	Jasa Giro	--	6.000.000	
3	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP.TGR)	--	--	
4	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan Daerah	--	--	
5	Angsuran dan atau Cicilan Rumah Dinas	--	--	
6	Penerimaan Lain-lain yang tidak termasuk salah satu bagian	--	5.535.000	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	--	--	
8	Penerimaan SIUP, TDP, Izin Usaha Industri dan TDG	--	--	
		254.345.000	309.613.300	

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Bukit Duri Telp. (0918) 21431. Fax. (0918) 21431
 SAUMLAKI

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2002		KET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	PAJAK DAERAH :	161.475.000	122.485.900	
1	Pajak Hotel	5.040.000	5.040.000	
2	Pajak Restoran	10.740.000	5.505.000	
3	Pajak Hiburan	28.920.000	6.646.000	
4	Pajak Reklame	34.275.000	43.050.000	
5	Pajak Penerangan Jalan	50.000.000	24.000.000	
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c	32.500.000	38.244.900	
II	RETRIBUSI DAERAH	223.150.000	229.758.455	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000	43.650.355	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	16.200.000	1.394.000	
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	17.375.000	17.315.000	
4	Retribusi Pasar	31.350.000	22.442.000	
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.000.000	15.000.000	
6	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	27.200.000	32.845.000	
7	Retribusi Terminal	27.150.000	14.613.500	
8	Retribusi Izin Membangun Bangunan	5.000.000	-	
9	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	5.950.000	5.300.000	
10	Retribusi Izin Gangguan	--	975.000	

1	2	3	4	5
11	Retribusi Izin Trayek	8.925.000	14.575.000	
12	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	6.500.000	3.000.000	
13	Retribusi Izin Pengeluaran Barang dari Daerah	--	1.480.000	
14	Retribusi Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi	--	733.650	
15	Retribusi Izin Kepariwisataa	4.000.000	6.199.000	
16	Pungutan Daerah Usaha Perikanan	38.500.000	40.735.950	
17	Retribusi Izin Pungutan Hasil hutan	--	3.500.000	
18	Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan	--	6.000.000	
	III LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH			
1	P.T. Bank Maluku	--	--	
2	Perusahaan Daerah Air Minum	--	--	
	IV LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	193.900.000	544.922.000	
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	--	--	
2	Jasa Giro	12.500.000	251.000.000	
3	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP.TGR)	--	--	
4	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan Daerah	--	--	
5	Angsuran dan atau Cicilan Rumah Dinas	--	--	
6	Penerimaan Lain-lain yang tidak termasuk salah satu bagian	173.400.000	148.800.000	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	--	138.047.000	
8	Penerimaan SIUP, TDP, Izin Usaha Industri dan TDG	8.000.000	7.075.000	
		578.525.000	897.166.355	


PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Bukit Duri Telp. (0918) 21431. Fax. (0918) 21431
 SAUMLAKI

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2003		KET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	PAJAK DAERAH :	218.500.000	364.207.499	
1	Pajak Hotel	7.000.000	5.166.000	
2	Pajak Restoran	6.500.000	5.985.000	
3	Pajak Hiburan	10.000.000	6.670.000	
4	Pajak Reklame	75.000.000	89.028.000	
5	Pajak Penerangan Jalan	80.000.000	214.363.980	
6	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c	40.000.000	42.994.519	
II	RETRIBUSI DAERAH	675.172.450	778.398.716	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	80.000.000	96.961.000	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan	2.500.000	2.274.000	
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	90.000.000	47.752.500	
4	Retribusi Pasar	50.000.000	47.224.700	
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000	31.000.000	
6	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	32.500.000	32.844.500	
7	Retribusi Terminal	23.500.000	23.557.000	
8	Retribusi Izin Membangun Bangunan	65.000.000	60.287.676	
9	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.800.000	6.445.000	
10	Retribusi Izin Gangguan	2.500.000	2.345.000	

1	2	3	4	5
11	Retribusi Izin Trayek	22.500.000	25.250.000	
12	Retribusi Tempat Pendaratan Kapal	3.500.000	4.000.000	
13	Retribusi Izin Pengeluaran Barang dari Daerah	30.000.000	17.780.500	
14	Retribusi Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi	3.500.000	3.260.500	
15	Retribusi Izin Kepariwisataaan	15.000.000	9.165.000	
16	Pungutan Daerah Usaha Perikanan	50.000.000	58.178.200	
17	Retribusi Izin Pungutan Hasil hutan	116.872.450	257.919.350	
18	Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan	--	6.346.790	
19	Retribusi Izin Perdagangan	50.000.000	45.807.000	
III	LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	--	--	
1	P.T. Bank Maluku	--	--	
2	Perusahaan Daerah Air Minum	--	--	
IV	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	2.044.000.000	2.379.731.956	
1	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	--	--	
2	Jasa Giro	120.000.000	138.214.263	
3	Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (TP.TGR)	--	--	
4	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Proyek/Pekerjaan Daerah	--	--	
5	Angsuran dan atau Cicilan Rumah Dinas	--	--	
6	Penerimaan Lain-lain yang tidak termasuk salah satu bagian	1.924.000.000	2.181.309.193	
7	Sumbangan Pihak Ketiga	138.000.000	60.208.500	
8	Penerimaan SIUP, TDP, Izin Usaha Industri dan TDG	--	--	
		2.937.672.450	3.552.338.171	

Saumlaki, 14 Januari 2004
A. KERALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
YANG MEWAKILI
Drs. A. DAHOKLORY
PENATA
NIP. 680 003 528



PENERIMAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2001 – 2003

No.	Sumber Pendapatan	Tahun			Ket
		2001	2002	2003	
1	IUP	35.291.250	32.660.225	36.650.000	
2	SKA	1.436.250	8.075.725	21.528.200	
3	SPI	-	-	-	
4	SKMI	-	-	-	
5	Lain-lain			190.919.413	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Sektor Perikanan
	Jumlah	36.727.500	40.735.950	249.097.613	



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BADAN KESBANG DAN LINMAS
JLN. SIFNANA - SAUMLAKI
Telp. (0918) 21045

Saumlaki, 9 Januari 2004

Nomor : 070/162/BKBPM/MTB/04
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada
Yth Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kab. MTB
di -
Saumlaki

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nomor : 771/PD I /FE/XII/03 Tanggal 15 Desember 2003 Tentang Izin Penelitian, maka bersama ini Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Liberata Malirmasela
NIM : 002 114 146
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII
Judul : Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Waktu : Bulan Januari - Pebruari 2004

Demikian Izin Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan kepada pihak terkait agar dapat memberikan dukungan data dan informasi sesuai kebutuhan.

Kepala Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pt. Kabag Tata Usaha


[Handwritten Signature]
K. KNYARTUTU, S.Sos
NIP. 630 009 216

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. MTB di Saumlaki;
2. Yang bersangkutan di tempat;
3. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
BADAN KESBANG DAN LINMAS

JLN. SIFNANA – SAUMLAKI

Telp. (0918) 21405

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/192/BKBP/MTB/04

Bupati Maluku Tenggara Barat CQ. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat di Saumlaki menerangkan dengan benar bahwa:

Nama : Liberata Malirmasele
NIM : 002114146
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi
dengan judul : **“KONTRIBUSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH”**
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Saumlaki, 9 Februari 2004

Kepala Badan Kesbang dan Linmas

Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Pt. Kabag Tata Usaha



K. KNYARTUTU, S.Sos

MP. 630 009 216



Tembusan:

1. Bupati Maluku Tenggara Barat (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan di tempat
3. Peringgal